BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Dimana tanah merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini kemudian memberikan arti bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur, merencanakan serta mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Hak menguasai Negara yaitu mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum. Salah satu fungsi tanah ialah untuk pembangunan rumah ibadah. Keperluan tanah untuk rumah ibadah tentunya menimbulkan perbuatan hukum bagi pemegang hak dengan peraturan-peraturan yang ada dalam menentukan hak atas tanahnya.

Pancasila merupakan dasar ideologi negara sekaligus menjadi dasar falsafah bagi Bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, sehingga setiap materi muatan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila ini yang

menjadi tolak ukur sekaligus orientasi arah bagi nilai-nilai kehidupan baik nilai keagamaan, adat istiadat, kebudayaan dan kemanusiaan. Sila pertama Pancasila, yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta menekankan perlunya pengakuan dan perlakuan setara bagi seluruh agama dan kepercayaan.[1]

Nilai Ketuhanan dalam sila pertama sudah menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara pluralism, pluralisme agama artinya setiap umat beragama harus saling menghargai dan menghormati hubungan sosial antar agama. Setiap individu mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih, menganut dan mengajarkan suatu agama tanpa campur tangan agama atau kepercayaan orang lain. Pentingnya kerangka moral dalam pluralisme agama bertujuan untuk memperkokoh hubungan inklusivitas dan solidaritas antar pemeluk agama bukan untuk melahirkan konflik atau gesekan antar agama.[2] Di dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan bagian

[1] Buhar Hamja, 2017, "Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa", *Jurnal Ummu*, Vol. 20, 9 Juni 2017, Fakultas Hukum Ummu Ternate, hlm. 12.
[2] Mariyadi Faqih, 2016, "Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme", *Jurnal Konstitusi*, Vol8/No-04/Januari/2011, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 446

dari hak politik dan sipil rakyat Indonesia, sehingga pelaksanaannya perlu campur tangan dari pemerintah. Kebebasan beragama dan beribadah juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut:

(1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

(2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*

Dengan adanya pasal ini, kebebasan beragama di Indonesia merupakan hak dasar manusia dan hak sipil masyarakat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi.

Indonesia mengakui adanya enam agama yang sah dipeluk secara hukum dan administrasi negara yaitu, Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.[3] Salah satu agama yang diakui di Indonesia adalah Kristen Protestan. Kristen Protestan adalah suatu kepercayaan yang berdasar pada Alkitab. Agama Kristen Protestan dimulai dari pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang dianggap sebagai tokoh sentral dalam agama ini. Agama Kristen merupakan agama tertua dan penganut terbesar di dunia. Agama ini pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya 645 Masehi. Konsep

[3] I Wayan, 2020, *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia*, UNHI Press, Bali, hlm. 21.

Ketuhanan dalam Kristen Protestan tergambar dalam tiga pribadi atau biasa disebut dengan *trinitas*, yaitu Allah Bapa, Allah Putera, dan Roh Kudus.[4]

Semua orang yang beragama dalam menjalankan keagamaannya memerlukan tempat untuk beribadah. Umat Kristiani melaksanakan ibadah mereka di gereja sebagai tempat untuk bersekutu dan berdoa. Gereja sebagai tempat persekutuan memerlukan kepastian hukum untuk melindungi hak-haknya. Di Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur bahwa:

(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Berdasarkan peraturan tersebut maka badan-badan keagamaan termasuk gereja dapat menguasai tanah dengan hak milik dan hak pakai

[4] Nur Maria dan M. Qomarul, 2023, "Perbedaan Sakramen dalam Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan", Gunung Djati Conference Series, Vol. 29, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, hlm. 26.

atas tanah negara, yang dimana kepastian hukum gereja itu dapat berupa hak milik dan hak pakai. Hak milik diartikan sebagai bentuk hak yang paling kuat dan terpenuh karena memberikan pemiliknya wewenang yang lebih luas dari pada hak atas tanah lainnya. Di dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa yang dapat memperoleh hak milik adalah Warga Negara Indonesia dan oleh pemerintah ditetapkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dengan memenuhi syarat. Adapun sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah mengatur terkait badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, antara lain:

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);
c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Peraturan diatas menjelaskan lebih spesifik terkait badan-badan apa saja yang dapat memperoleh hak milik. Sehingga dapat di simpulkan bahwa gereja merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum, gereja memperoleh status subjek hukum yang berarti gereja memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang pribadi (natuurlijk person).[5] Selain itu,

[5] Saudaranta Tarigan, Gereja Sebagai Badan Hukum, https://www.hukumonline.com/klinik/a/gereja-sebagai-badan-hukum-lt515c73d832216/, diakses 6 Januari 2014.

gereja yang telah berstatus sebagai badan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk melakukan perbuatan hukum, perlu adanya pendaftaran tanah terlebih dahulu.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, mendefinisikan Pendaftaran Tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinabungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan fisik dan data yuridis dari setiap bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat, badan hukum dan instansi pemerintah. Secara normatif tujuan dari pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam rangka memberi kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah diberikan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis maupun data fisik objek tanah yang didaftarkan. Sertipikat tanah memiliki

beberapa kekuatan hukum yaitu bukti otentik kepemilikan, asas legalitas dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 32 diatur mengenai isi dari sertipikat tanah yang meliputi identitas pemegang hak, jenis hak, luas tanah, letak tanah, dan data lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Tomasia Maria De Deus yang meneliti terkait perolehan Hak Milik Guna Mendapatkan Kepastian Hukum, Gereja Katolik Priwulung sudah memperoleh sertipikat Hak Milik yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Sleman pada tahun 2011. Gereja Katolik Babarsari memperoleh sertipikat Hak Milik yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tahun 2012. Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Priwulung dan Gereja Katolik Santa Maria Assumpta Babarsari telah memperoleh kepastian hukum berupa Hak Milik.[6]

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 22 Tahun 1969 tentang Penunjukan Badan Gereja Protestan di Indonesia Bahagian Barat sebagai badan hukum yang berhak memiliki tanah, dinyatakan bahwa badan-badan gereja sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut dapat mengkonversi tanah-tanah dengan hak eigendom yang telah dimiliki sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, menjadi hak milik

[6] Tomasia Maria, 2015, *Pelaksanaan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Kas Desa (Oleh Gereja Katolik) Di Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.58.

selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan yang kegiatan utamanya dalam bidang keagamaan.

Keberagaman tempat ibadah di Kota Yogyakarta menjadi salah satu ciri khas kota ini, termasuk Gereja Kristen Protestan. Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun para perantau yang tinggal di Kota Yogyakarta, salah satunya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family. Dalam konteks hukum, keberadaan dan kegiatan gereja-gereja seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan terkait dengan kepastian hukum, mulai dari perizinan pendirian tempat ibadah, pengelolaan aset gereja, hingga pelaksanaan kegiatannya dikarenakan regulasinya yang kompleks dan interpretasi hukum yang berbeda. Kepastian hukum hak atas tanah gereja tidak hanya penting untuk kelangsungan beribadah melainkan menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi.

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya berpusat di Kota Yogyakarta, tepatnya di jalan Achmad Yani. Pada tanggal 11 Oktober 1857, Gereja Protestan diresmikan sebagai gedung gereja dan pemberkatan gedung gereja dilakukan oleh Dominee C.G.S. Begemann. Gedung tersebut dibangun di atas tanah milik pemerintah menurut arsip yang ada, namun karena sejak awal pembangunan telah mendapatkan izin dari pemerintahan, bahkan dengan keterlibatan langsung gubernur, gereja berupaya untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah

dan gedung tersebut. Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family, yang sebelumnya dikenal dengan nama Gereja Pentakosta Argolobang, didirikan pada tanggal 18 Maret 1979 di Jalan Argolobang Nomor 30 oleh Almarhum Bapak Pdt. Petrus Suwondo. Kemudian karena pertambahan jemaat gedung berpindah dari Jalan Argolobang ke Jalan Sosrowijayan yang kemudian gedung tersebut diresmikan pada tanggal 28 September 1991 oleh Dirjen Bimas Kristen dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula tanah tersebut dibeli secara perorangan, namun seiring dengan pembentukan yayasan, maka hak atas tanah yang semula adalah Hak Milik kemudian diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan di atas tanah negara yang berlaku hingga sampai saat ini. Dalam penulisan ini diketahui bahwa kedua gereja yang diteliti memiliki hak atas tanah yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya yaitu apakah Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pantekosta di Indonesia Hagios Family sudah memperoleh sertipikat sebagai wujud Kepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta sudah memiliki sertipikat sebagai wujud Kepastian Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum umumnya dan Hukum Pertanahan khususnya mengenai Kepastian Hukum Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Kepastian Hukum Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta bagi Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengurus Gereja Kristen Protestan terkhusus Pengurus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan proposal penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiat dari skripsi yang sudah ada. Berikut perbandingan yang terdapat pada beberapa hasil skripsi dengan topik serupa antara lain:

1. a. Judul penelitian : Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Badan keagamaan

b. Identitas

1) Nama	:	Advent Pateh
2) Fakultas	:	Hukum
3) Universitas	:	Atma Jaya Yogyakarta
4) Tahun	:	2022
c. Rumusan Masalah	:	Bagaimanakah Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Hak Milik atas Tanah oleh Badan keagamaan Kongregasi MSC Indonesia?
d. Hasil Penelitian	:	Bahwa Badan Keagamaan Kongregasi MSC Indonesia adalah subjek hukum pemegang hak milik dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui kedudukannya dengan mengingat ketentuan fungsi sosialnya. Kepastian hukum kepemilikan hak milik oleh badan keagamaan ini secara sistematisasi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) UUPA yang di implementasikan melalui PP NO 38 Tahun 1963 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi

	No.1/Dd.AT/Agr/1967 yang menunjuk Badan-Badan Gereja Roma Katolik sebagaimana dimaksudkan dalam Dokumen Staatsblad Tahun 1927 No. 155, 156 dan 532 bahwa status Kongregasi adalah sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Selain hak milik, untuk badan keagamaan dan sosial disediakan hak pakai yang dapat diberikan dengan cuma-cuma dan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dalam arti selama tanahnya masih dipergunakan untuk keperluan yang sesuai dengan peruntukannya. Maka, secara yuridis Badan Keagamaan Kongregasi MSC Indonesia sudah memiliki kepastian hukum berupa Hak Milik.
e. Perbedaan	Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada Pokok Bahasannya yaitu terkait Kepastian Hukum Hak Milik dan Lokasi penelitian di Kongregasi

Misionaris Hati Kudus Indonesia, sedangkan penulis meneliti terkait Kepastian Hukum Gereja Kristen dan Lokasi penelitian berada di Kota Yogyakarta.

2.	a. Judul penelitian	:	Perlindungan Hukum Terhadap Gereja Yang Beroperasi Dalam Rumah Toko, Ruangan Serbaguna, Dan Mall Untuk Menciptakan Ketertiban Umum
	b. Identitas		
	1) Nama	:	Ivan Ronaldo
	2) Fakultas	:	Hukum
	3) Universitas	:	Jambi
	4) Tahun	:	2024
	c. Rumusan Masalah	:	Bagaimana kepastian hukum gereja yang berdiri di dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall? Bagaimana akibat hukum beroperasinya gereja yang bertempat di rumah toko, ruangan serbaguna dan mall menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?

d. Hasil Penelitian	Gereja yang berdiri dalam rumah toko ruangan serbaguna dan mall terjadi karena faktor perubahan umat kristiani dalam melihat suatu ibadah terutama semakin berkembangnya jaman begitu pula semakin sulitnya syarat pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Peraturan yang ada dimana seharusnya memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama apapun, namun nyatanya situasi yang terjadi, peraturan yang ada tidak memberikan kejelasan status hukum rumah ibadah yang ada. Gereja yang beroperasi lebih dari dua tahun yang tidak didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah, maka adalah batal demi hukum.
e. Perbedaan	Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada letak pada Pokok Bahasannya yaitu Perlindungan

Hukum, sedangkan penulis meneliti berkaitan dengan Kepastian Hukum

3.	a. Judul penelitian	:	Tinjauan Yuridis Atas Kepastian Bentuk Badan Hukum Bagi Gereja-Gereja Di Indonesia Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Gereha Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
	b. Identitas		
	1) Nama	:	Vica Rianti Ramelan
	2) Fakultas	:	Hukum
	3) Universitas	:	Kristen Maranatha
	3) Tahun	:	2018
	c. Rumusan Masalah	:	Apakah bentuk badan hukum yang seharusnya dimiliki oleh gereja-gereja dalam pendiriannya? Bagaimana Bentuk badan hukum yang dimiliki oleh gereja-gereja sebagai subjek hukum?
	d. Hasil Penelitian	:	Macam-macam bentuk badan hukum yang dimiliki gereja-gereja yaitu Gereja, Yayasan dan Perkumpulan

		Kegiatan Keagamaan. Negara berkewajiban melindungi hak setiap subjek hukum yang melaksanakan kegiatan keagamaan. Perlindungan hak ini dilakukan untuk mencapai tujuan menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
e. Perbedaan	:	Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada letak pada Pokok Bahasannya yaitu Kepastian Bentuk Badan Hukum, sedangkan penulis meneliti berkaitan dengan Kepastian Hukum.

F. Batasan Konsep

1. Gereja adalah sekumpulan orang percaya yang sudah dibaptiskan dan diikat menjadi satu oleh iman dan Persekutuan dalam Kristus; gereja mentaati perintah Kristus, dihukum-hukumNya; gereja memakai karunia-karunia Allah, gereja memakai kesempatan-kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. (G. W. Schweer)

2. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)
3. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)
4. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinabungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah)
5. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. (Sudikno Mertokusumo, 2016, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian langsung berupa pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner, dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.[7] Perolehan data secara langsung dari responden dan narasumber berkaitan dengan Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta Sebagai Wujud Kepastian Hukum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data dari responden dan narasumber yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mengenai Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta Sebagai Wujud Kepastian Hukum.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

[7] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, KENCANA, Jakarta, hlm. 149-150

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam bentuk berurutan sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

a) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku-buku mengenai hukum pertanahan, buku-buku hak atas tanah dan buku-buku terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain, sebagai pelengkap.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder akan diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaaa.

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu pengurus gereja, melalui wawancara kepada narasumber mengenai Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta Sebagai Wujud Kepastian Hukum. Metode ini digunakan ketika subjek penelitian dan peneliti bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta Sebagai Wujud Kepastian Hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari semua Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta akan diambil secara *Random Sampling*, yaitu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family.

5. Populasi

Populasi adalah kelompok objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk studi dan kemudian disimpulkan.[8] Populasi penelitian ini adalah seluruh gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta. Dari 20 (dua puluh) gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta diambil secara acak dua gereja Kristen Protestan yaitu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family.

6. Sampel

Sampel merupakan sebagian data dari populasi yang diperoleh melalui prosedur tertentu untuk mendapatkan keterangan.[9] Penentuan sampel dari penelitian ini diambil 10% dari populasi secara random sampling. Sampel penelitian ini adalah Gereja Protestan di Indonesia

[8] Dameria Sinaga, 2014, *Statistik Dasar*, UKI PRESS, Jakarta Timur, hlm. 4
[9] *Ibid*., hlm 6.

bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family.

6. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan respon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini responden berdasarkan sampel adalah Pengurus Gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta, yaitu Pak Hari dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan Pak Gati dari Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family.

7. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena kepakarannya, profesi, dan/atau jabatannya memberikan jawaban terkait pertanyaan guna menambah dan melengkapi data dari responden. Narasumber penelitan ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data dari penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisis fakta dan data Hak Atas Tanah Gereja Kristen.

H. Sistematika Penelitian Hukum/Skripsi

Penulisan hukum ini terdiri dari sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistemstika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Pendaftaran Tanah, Gereja Kristen Protestan, dan Hasil Penelitian dengan objek Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family

BAB III: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran